

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI  
AGAMA SEMARANG No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. TENTANG  
PENARIKAN HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu  
Syari'ah**



**Oleh :**

**FAJAR ISKANDAR**  
**NIM : 2103102**

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
S E M A R A N G  
2008**

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H

NIP. 150 254 348

Tugu Rejo Semarang

Nur Fatoni, M.Ag

NIP. 150 299 490

Gondang Cepiring Kendal

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fajar Iskandar

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Fajar Iskandar

NIM : 2103102

Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. Tentang Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anak.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 09 Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Eman Sulaeman**  
**NIP. 150 254 348**

**Nur Fatoni, M.Ag.**  
**NIP. 150 299 490**

**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jalan Raya Boja Ngaliyan Km. 3 Semarang 50159 telp.  
(024)7601297

---

**PENGESAHAN**

N a m a : Fajar Iskandar  
N I M : 2103102  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/al-Ahwal al-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama  
Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg Tentang  
Penarikan Hibah Kembali Orang Tua Terhadap Anak  
Telah Dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

29 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka  
menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik  
2007/2008 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang 29 Juli 2008

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag**

**Nur Fatoni, M.Ag.**

**NIP. 150 282 133**

**NIP. 150 299 490**

Penguji I

Penguji II

**Hj. Rr. Sugiarti, S.H., M.H**

**Drs. Moh. Solek, M.A**

**NIP. 150 104 180**

**NIP. 150 262 648**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Eman Sulaiman, M.H**

**Nur Fatoni, M.Ag**

**NIP. 150 254 348**

**NIP. 150 299 490**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2008

Deklarator

**Fajar Iskandar**  
NIM. 2103102

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan”. (Q.S. An-Nisa’ : 135)\*

---

\* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1974, hlm. 144.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Robbu al-Alamin atas segala limpahan rahmat, hidayah dan ‘inayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg Tentang Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anak**, dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti. Shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do’a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dan Pembantu-pembantu Dekan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar hingga kini.
2. Drs. H. Eman Sulaiman, M.H selaku pembimbing I, dan Nuf Fathoni, M.Ag atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
3. Bapak kajar, sekjur, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya.
4. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do’a, perhatian dan curahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
5. Teman-teman di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin (PPRT) dan teman-teman di Pondok Pesantren Luhur Salafi (PPLDM).

6. Sudarmono, Saefudin (Gaper), Ahmad Faqihuddin, Erfan Widianoro, M. Ikhwanul Fanani, Nasuka Mubarak (PEACE PALA) dan semua temen-temen yang berada di Fakultas Syari'ah khususnya di Jurusan AS paket ASB angkatan 2003.
7. Semua temen-temen di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Atas semua kebaikannya, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Semarang, 2008  
Penulis,

**Fajar Iskandar**  
NIM. 2103102

## ABSTRAK

Upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah upaya banding. Yang dimaksud dengan upaya banding adalah permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu atau oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama “diperiksa ulang” kembali dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama.

Mengenai perkara penarikan kembali hibah orang tua terhadap anak, Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah memeriksa berkas perkara dari Pengadilan Agama Pemalang No: 625/Pdt.G/2006/PA.Pml. yang memutuskan perkara tersebut sama-sama menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak menguatkan putusan Pengadilan Agama Pemalang, jika merujuk kepada pasal tersebut.

Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan :

- a. Bagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak dilihat dari hukum materiil.
- b. Bagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak dilihat dari hukum formal.

Kerangka metodologi yang dipakai adalah library reseach yang difokuskan pada dokumen. Metode ini yang dijadikan sumber data yang berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. tentang penarikan kembali hibah orang tua terhadap anak, adapun wawancara dijadikan sebagai data tambahan.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menangani perkara No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. sama-sama menggunakan dasar hukum yang dipakai majelis hakim Pengadilan Agama Pemalang yaitu menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Di Pengadilan Agama Pemalang berpendapat bahwa pasal tersebut tidak diperlukan syarat-syarat tertentu, sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang melihat pasal tersebut haruslah melihat dahulu dari kasusnya, jelas sudah bahwa pasal 212 Kompilasi Hukum Islam bukanlah harga mati. Pengadilan Tinggi Agama adalah pengadilan yang menguatkan putusan pengadilan agama atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama jika putusan tersebut dianggap terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadilinya. Pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang putusannya adalah membatalkan gugatan Penggugat sekarang terbanding.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH</b>	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Hibah .....	13
B. Rukun Dan Syarat Hibah .....	18
C. Jenis Hibah.....	23
D. Penarikan Kembali Hibah .....	25
<b>BAB III          PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA</b>	
<b>SEMARANG      No:      15/Pdt.G/2007/PTA.Smg.</b>	
<b>TENTANG PENARIKAN HIBAH ORANG TUA</b>	
<b>TERHADAP ANAK</b>	
A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Tinggi	
Agama Semarang.....	31
B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No:	
15/Pdt.G/2007/PTA.Smg .....	39

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. TENTANG PENARIKAN HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK</b>	
A.	Analisis Hukum Materiil Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg Tentang Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anak .....	51
B.	Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg Tentang Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anak.....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	61
B.	Saran .....	63
C.	Penutup .....	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah saling memberi. Dalam hal memberikan suatu harta benda seseorang boleh menghadihkan atau memberikan harta miliknya kepada orang lain ketika masih hidup atau memberikannya ketika sudah meninggal dunia.

Dalam Islam banyak cara untuk melakukan kebaikan atau menyalurkan hartanya kepada orang lain, Ada beberapa macam nama pemberian dalam Islam, seperti wasiat, hadiah, sedekah, hibah dan wakaf. Pemberian itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mewujudkan kasih sayang diantara sesama manusia dan maksud tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan memberikan balasan serupa. Suatu hadiah dapat menjadikan kecintaan pada diri penerima hadiah kepadanya. Selain itu tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah.

Islam mengizinkan seseorang memberikan sebagai hadiah semua harta miliknya ketika masih hidup, tetapi perlu diingat juga dalam pemberian harus ada sifat keadilan. Seperti memberi kepada seorang anak, kita harus bisa bersifat adil, karena jika pemberian tidak didasarkan pada keadilan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi lain halnya ketika

pemberi itu telah meninggal dunia, karena ada ketentuan lain yang mengaturnya dan itulah yang disebut sebagai wasiat, dan wasiat itu boleh diberikan kepada yang bukan anggota keluarga atau yang bukan berhak menerima warisan asalkan tidak melebihi dari harta peninggalan.

Wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya si pewasiat dengan jalan *tabarru'* (kebaikan tanpa menuntut imbalan). Pengertian ini untuk membedakan antara wasiat dengan hibah.<sup>1</sup> Pemberian harta setelah pemberi meninggal dunia tidaklah serta merta diberikan semuanya, tetapi hanyalah sepertiga dari harta benda itu dapat diberikan surat wasiat.<sup>2</sup> Berbeda dengan hibah yang pemberiannya atau pelaksanaannya ketika masih hidup dan harta milik bisa diberikan semuanya.

Di dalam syara' hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan, maka hal itu disebut pinjaman.

Tetapi jarang suatu pemberian yang diberikan tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan balasan atau imbalan sebagai pembalas dari apa yang telah diberikannya, karena biasanya seseorang memberi pasti ada maksud tertentu untuk mendapatkan suatu tujuan yang ingin didapat.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. III, hlm. 439.

<sup>2</sup> Asaf A.A Fyze, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tintamas, 1966, hlm 1.

Dalam prakteknya, banyak hibah yang ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai macam alasan. Seperti penerima hibah berperangai jahat, buruk, atau berjiwa pemboros. Hal itu diketahui setelah hibah diberikan seiring jalannya waktu. Sebagai buktinya yaitu adanya kasus gugat menggugat hibah di pengadilan antara penghibah dengan yang diberi hibah. Terhadap masalah di atas tentang penarikan hibah banyak ulama berpendapat tentang boleh tidaknya mengenai penarikan hibah, dikarenakan mereka melihat dari hadits Nabi SAW. dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Nabi SAW. bersabda:

لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده.  
ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في  
قيئه. (رواه ابو داود و النساء و ابن ماجة و الترمذي )

Artinya: “Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu hibah dari orang tua<sup>3</sup>) kepada anaknya<sup>4</sup>) perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia ruju’ di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahannya kembali”.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan masalah penarikan hibah, pernah terjadi kasus penarikan hibah orang tua terhadap anak di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, di mana dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg yang merujuk pada putusan Pengadilan Agama Pemalang perkara No: 625/Pdt.G/2006/PA.Pml. yang memutuskan perkara

<sup>3</sup> Ibu itu hukumnya seperti ayah menurut sebagian ulama.

<sup>4</sup> Baik anak itu sudah besar ataupun masih kecil.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1997, hlm. 182.

tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak dengan menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.<sup>6</sup> Maka dalam amar putusannya Pengadilan Agama Pemalang mengabulkan gugatan Penggugat (orang Tua) bahwa harta yang menjadi sengketa dapat ditarik kembali oleh orang tuanya sendiri.

Akan tetapi setelah perkara tersebut diperiksa kembali di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. dengan menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Majelis hakim dalam amar putusannya tidak menguatkan putusan di Pengadilan Agama Pemalang, melainkan mengambil keputusan sendiri dengan pertimbangan hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 bukanlah harga mati, tetapi masih ada celah untuk dipertimbangkan lagi dengan memeriksa kembali berkas perkara dari Pengadilan Agama Pemalang.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas, penulis tertarik mengangkat kasus tersebut dalam skripsi dengan judul: “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg Tentang Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anak”.

---

<sup>6</sup> Bahan Penyuluhan Hukum (UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001, hlm. 207.

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Ali Muchson, M.Hum (Hakim Ketua Majelis) Tanggal 9 Juni 2008.

## **B. Permasalahan**

Setelah melihat dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak dilihat dari hukum materiil.
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak.

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak dilihat dari hukum materiil.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak.

## **D. Telaah Pustaka**

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahannya, dengan mengambil langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditemukan tulisan yang lebih spesifik dan

yang mendetail yang membahas tentang masalah penarikan hibah orang tua terhadap anak dalam putusan pengadilan. Namun demikian ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan penarikan hibah, antara lain:

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Pada tulisan tersebut pada dasarnya membahas tentang pengertian hibah, rukun-rukun hibah, syarat-syarat hibah, serta pendapat para ulama Mazhab tentang penarikan hibah, Jumhur ulama berpendapat bahwa pemberi hibah, tidak boleh mencabut kembali hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.<sup>8</sup>

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Membahas pengertian hibah, dasar hukum hibah, dan hibah hubungannya dengan warisan, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (KHI ps. 211), masalah penarikan kembali hibah yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Kendatipun demikian, menurut hemat penulis kebolehan menarik kembali, dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.<sup>9</sup>

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Dalam buku ini ada pembahasan masalah hibah, yang hampir sama dengan buku-buku sebelumnya, seperti pengertian, rukun, syarat hibah. Pengharaman melebihi pemberian dan

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

<sup>9</sup> Ahmad Rofik, *Op. Cit.*



kebajikan kepada sebagian dari anak-anak, karena yang demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturrahim. Serta penarikan kembali hibah.<sup>10</sup>

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Dalam buku ini pada dasarnya berisi pendapat para ulama. Diungkapkan Malik dan jumhur ulama Madinah berpendapat bahwa ayah diperbolehkan mengambil kembali harta yang telah dihibahkannya kepada anaknya selama anaknya ini belum berhubungan dengan hak orang lain. Abu Hanifah berpendapat bahwa setiap orang diperbolehkan mengambil kembali harta yang telah dihibahkannya kecuali harta yang dihibahkan kepada kerabat yang haram dinikahinya. Jumhur ulama sepakat bahwa hibah yang dimaksudkan sebagai sedekah, yakni hibah karena Allah, maka siapapun tidak diperbolehkan mengambilnya kembali.<sup>11</sup>

Muhammad Munir, dalam skripsinya “*Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i Tentang hukum Pencabutan Kembali Hibah*”. Dalam analisisnya bahwa Imam Syafi’i berpendapat bahwa hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik,

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Bandung: Trigenda Karya, 1996.

maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.<sup>12</sup>

Dari berbagai kepustakaan di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penelitian-penelitian yang sudah ada secara umum membahas tentang penarikan hibah. Sedangkan yang penulis teliti saat ini lebih spesifik dengan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>13</sup> Sedangkan dalam penelitian ini menitikberatkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah Penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada intitusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi,

---

<sup>12</sup> Muhammad Munir, *Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pencabutan Kembali Hibah*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2006.

<sup>13</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, Cet. I, hlm 109.

dan sebagainya).<sup>14</sup> Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak.

## 2. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber literatur yang utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen putusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

## 3. Metode pengumpulan data

### a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>15</sup> Diantara dokumen yang penulis gunakan adalah putusan Pengadilan Tinggi Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 88-89.

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. XVIII, hlm. 161.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Adapun wawancara dengan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai data pendukung.

4. Metode analisis data

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.<sup>17</sup>

Dalam hal ini yang dianalisis adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

---

<sup>16</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995, Cet. II, hlm. 192.

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, Cet III, hlm. 7.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan hasil penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, dimana satu bab dan bab yang lainnya saling mendasari dan terkait. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini dijelaskan latar belakang masalah, selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah yang ada, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang hibah. Bab ini merupakan landasan teori yang berisikan empat sub bab. Bab pertama tentang pengertian dan dasar hukum hibah. Bab kedua tentang rukun dan syarat hibah. Bab tiga tentang jenis hibah. Bab empat tentang penarikan hibah.

Bab III Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak. Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang didahului oleh gambaran umum profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang di dalamnya memuat tentang lahirnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang, struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, gambaran umum putusan Pengadilan Agama Pemalang No: 625/Pdt.G/2006/PA.Pml., kemudian putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg, di dalamnya memuat tentang pertimbangan hukum majelis hakim dan dasar hukum majelis hakim.

Bab IV Analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak dilihat dari hukum materiil. Dan analisis terhadap dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak.

Bab V Penutup hasil akhir dari penelitian ini sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang akan berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH

#### A. Pengertian Dan Dasar Hukum Hibah

##### 1. Pengertian Hibah

Kata *hibah* adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba*,

( وهب – وهبا – وهبة ) artinya memberi.<sup>1</sup> Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.<sup>2</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>3</sup>

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.<sup>4</sup>

Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI ps. 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, Cet. 14, hlm. 1584.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. III, hlm. 466.

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi III. Cet. III, hlm. 398.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1996, hlm. 540.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, Cet. II, hlm. 156.

Pengertian hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa definisi hibah yang dikemukakan oleh para ulama:

1. Abd al-Rahmân al-Jazirî dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*,<sup>7</sup> menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.
2. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama mazhab Hambali. Ulama mazhab Hanbali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta

---

<sup>6</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999, Cet. 29, hlm. 436.

<sup>7</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz 3, hlm. 289-292.



tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan.<sup>8</sup>

3. Menurut Sayyid Sabiq,<sup>9</sup> hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
4. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi,<sup>10</sup> bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
5. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary,<sup>11</sup> bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.
6. Menurut pendapat Abi Yahya Zakariyah Al-Anshori hibah adalah: Memberikan sesuatu dari hak milik yang bersifat sunat pada waktu hidupnya.<sup>12</sup>
7. Berikut pendapat Teungku Muhammad Hasbie Ash Shiddieqy hibah ialah mengalih hak milik kepada orang lain secara Cuma-Cuma tanpa adanya bayaran.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th, Juz 3, hlm. 417.

<sup>10</sup> Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th, hlm. 39.

<sup>11</sup> Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th, hlm. 84.

<sup>12</sup> Abi Yahya Zakariyah Al-Anshori, *Fath Al-Wahab*, Semarang: Toha Putra, Juz 1, t.th., hlm. 259.

8. Menurut M. Ali Hasan hibah artinya: pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apa pun.<sup>14</sup>
9. Senada dengan Drs. Hamid Farihi, M.A., juga berpendapat bahwa: hibah didefinisikan sebagai akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.<sup>15</sup>
10. Menurut As Shan'ani dalam kitab Subulussalam yang diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad mengatakan bahwa hibah adalah : pemilikan harta dengan akad tanpa mengharapkan pengganti tertentu pada masa hidup.<sup>16</sup>

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian atau imbalan sedikitpun.

---

<sup>13</sup> Teungku Muhammad Hasbie Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh muamalah*, Cet. 4, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 98.

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 76.

<sup>15</sup> Chuzaimah dan Hafiz Anshary AZ. (Editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Cet.3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, hlm. 105.

<sup>16</sup> Abubakar Muhammad, *Subulussalam (Terjemah)*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995, hlm. 319.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 157.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai*”.

Rasulullah SAW. telah menerima hadiah dan membalasnya. Beliau menyerukan dan menganjurkannya. Dalam riwayat hadits Ahmad dari hadist Khalid bin Adi bahwa nabi SAW. telah bersabda,

من جاءه من اخيه معرف من غير اشراف ولا مساءلة فليقبله ولا يردده فانما هو رزق ساقه الله اليه.

Artinya: “*Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya bukan karena mengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerima dan tidak menolaknya, karena merupakan rezeki yang diberikan Allah kepadanya*”.<sup>19</sup>

## B. Rukun Dan Syarat Hibah

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sah suatu pekerjaan”<sup>20</sup> sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan lakukan”.<sup>21</sup>

Dalam syari’ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>22</sup> Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanyakeberadaan hukum syar’i, dan ia berada di luar hukum itu sendiri,

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4 (Terjemah)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cet. I, hlm. 436.

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op. Cit*, hlm. 966.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 1114.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 1510.

yang ketidakadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>23</sup> Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.<sup>24</sup>

### **1. Rukun Hibah**

Jumhur ulama mengatakan, bahwa rukun hibah itu ada empat, adapun yang menjadi rukun hibah yaitu:

1. Orang yang menghibahkan.
2. Orang yang menerima hibah.
3. Lafal hibah (*Ijab* dan *Qabul*)
4. Harta yang dihibahkan.

### **2. Syarat Hibah**

1. Orang yang menghibahkan
  - a. Penghibah itu adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu harta yang akan dihibahkannya. Dalam hibah terjadi pemindahan milik, karena itu mustahil seorang yang tidak mempunyai milik menghibahkan sesuatu atau barang kepada pihak yang lain.
  - b. Penghibah itu adalah orang yang telah mempunyai kesanggupan melakukan *tabarru'*. Maksudnya ialah ia telah mursyid, telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi suatu

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 1691.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 1692.

persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya itu.

- c. Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, seperti karena lemah akalnya ia ditetapkan berada di bawah perwalian.
- d. Penghibah melakukan hibah itu dalam keadaan mempunyai *iradah* dan *ikhtiar* dalam melakukan tindakannya. Seorang mempunyai *iradah* jika orang itu melakukan tindakan atas dasar kehendaknya, bukan karena dipaksa, atau suatu keadaan sehingga ia tidak dapat berbuat menurut kehendaknya seperti dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Seorang mempunyai *ikhtiar* dalam tindakannya apabila ia melakukan perbuatan atas pilihannya bukan karena dipilih orang lain. Tentu saja pilihan ini terjadi setelah memikirkan dengan matang.<sup>25</sup>

## 2. Orang yang menerima hibah

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah.

Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya atau pendidiknya, sekalipun orang asing.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Asymuni A. Rahman, dkk (Tim Penyusun), *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Depag RI, 1986, Cet. II, hlm. 202-203.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 438.

### 3. Harta yang dihibahkan

Menyangkut benda yang dihibahkan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Benda tersebut benar-benar ada
- b. Benda tersebut mempunyai nilai
- c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan
- d. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.<sup>27</sup>

### 4. Lafal hibah (*Ijab* dan *Qabul*)

Adapun hibah sah berlaku melalui *ijab* dan *qabul* dalam bentuk apapun selagi pemberian harta tersebut tanpa imbalan. Misalnya, seorang penghibah berkata, “Aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu,” atau semisalnya. Sedangkan orang lain berkata, “Ya, aku terima.”

Menyangkut *ijab* dan *qabul* yaitu adanya pernyataan, dalam hal ini dapat saja dalam bentuk lisan atau tulisan. Sedangkan menurut ulama Hanafi, yang dikutip Chairuman Pasaribu<sup>28</sup> berpendapat bahwa *ijab* saja sudah cukup tanpa harus diikuti oleh *qabul*, dengan perkataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak.

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa dipegangnya *qabul* di dalam hibah. Kalanagan mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijab* sudah

---

<sup>27</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Cet. II, hlm. 116.

<sup>28</sup> *Ibid.*

cukup dan itulah yang paling sahih. Sedangkan kalangan mazhab Hanbali berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan ketertarikan dengannya, karena Nabi Muhammad SAW. memberikan dan diberi hadiah. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat bahwa mereka tidak mensyaratkan *ijab* dan *qabul* atau semisalnya.<sup>29</sup>

Tentu saja lafal hibah itu hendaknya perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Bagi orang yang tidak atau kurang dapat berbicara, maka shighat hibah cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benar-benar mengandung arti hibah dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.

Sebenarnya ajaran Islam tidak mensyaratkan agar dalam hibah disiapkan alat-alat bukti, seperti saksi, surat-surat otentik dan sebagainya.<sup>30</sup> Tetapi banyak isyarat yang dari isyarat-isyarat itu dipahamkan bahwa sebaiknya dalam hibah itu ada alat-alat buktinya. Apalagi jika dikemudian hari terjadi perkara atau persoalan hibah itu, maka dengan adanya alat-alat bukti itu maka perkara atau persoalan itu mudah diselesaikan. Tentu saja yang diperlukan alat-alat bukti itu ialah hibah yang berhubungan dengan barang-barang yang tidak bergerak dan tahan lama, seperti tanah, kebun, rumah dan sebagainya.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 437.

<sup>30</sup> Asymuni A. Rahman, dkk (Tim Penyusun), *Op. Cit.*, hlm. 202-203.



### C. Jenis Hibah

#### 1. Umra

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah.<sup>31</sup> Hal demikian berlaku dengan lafazh, “Aku umrakan barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya ‘aku berikan kepadamu selama engkau hidup’, atau ungkapan yang senada.

#### 2. Ruqba

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada si pemberi bila si penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak si penerima.<sup>32</sup>

Banyak macam-macam pemberian, macam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda tersebut, macamnya adalah sebagai berikut:

1. *Al-Hibah*, adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.<sup>33</sup>
2. *Shadaqah*, pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 447.

<sup>32</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. III, 2001, hlm. 314.

<sup>33</sup> Chuzaimah dan Hafiz Anshary AZ. (Editor), *Op. Cit.*, hlm. 105.

3. *Hadiah*, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud mengagungkan atau karena rasa cinta.<sup>35</sup>
4. *Wasiat*, adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>36</sup>

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah *athiyah*. Dan pada umumnya orang sukar membedakan antara kata hibah, sedekah dan hadiah pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah dan hadiah, perbedaannya sebagai berikut:

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
3. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
4. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya dinamakan *athiyah*.<sup>37</sup>

Dan masih banyak lagi macam-macam pemberian.

---

<sup>34</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006, Cet III, hlm. 241.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam Seri Perundangan, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004, Cet. I, hlm. 80.

<sup>37</sup> Rachmat Syafei *Op. Cit.*, hlm. 241.

#### D. Penarikan Kembali Hibah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa membatalkan kembali hibah itu adalah tidak boleh (haram), sekalipun hibah itu terjadi pada saudara atau suami isteri, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya, maka mengambil kembali dibolehkan, berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW. dari Abu Bakar ibn Syaibah Abu Asamah, dari ‘Auf, dari Khilasi, dari Abi Hurairah:<sup>38</sup>

حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خُلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ مِثْلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ، كَمِثْلِ الْكَلْبِ، أَكَلَ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَهُ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ، فَأَكَلَهُ.

Artinya: “Ber cerita Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Asamah, dari ‘Auf, dari Khilasi, dari Abi Hurairah, Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: “perumpamaan orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah kemudian ia memakan muntahannya kembali”.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa itu tidak mengikat<sup>39</sup> oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW.

الْوَاهِبُ أَحَقُّ هَبَّتَهُ مَا لَمْ يَثْبُثْ عَلَيْهَا (رواه ابن ماجه و الدار قطني و الطبراني والحاكم)

Artinya: “Orang yang menghibahkan harta lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak dibarengi dengan ganti rugi”. (H.R. Ibnu Majah, ad Daru Quthni, ad Thabari dan al Hakim).<sup>40</sup>

Akan tetapi, mereka mengatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

<sup>38</sup> Al-Imaam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majjah al-Qazwini, *Sunan ibn Majjah*, Kairo: Tijariyah Kubra tth, hlm. 799.

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 80.

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 80.

- a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta atau uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya harta atau uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali. Ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad, seperti “Saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya”, atau diungkapkan setelah sah akad. Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti ungkapan penerima hibah “Kendaraan ini sebagai imbalan dari hibah yang engkau berikan kepada saya”, dan boleh juga ganti rugi atau imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah. Apabila ganti rugi atau imbalan setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya tidak boleh dicabut. Akan tetapi, apabila ganti rugi atau imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.
- b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharap pahala dari Allah untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami isteri, maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah tidak boleh dicabut.
- c. Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima hibah telah menambah harta yang telah dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbuh-

tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh hibah itu dicabut.

- d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah melalui cara apapun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.
- e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.
- f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang karena pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.<sup>41</sup>

Penarikan hibah dalam rumusan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Hukum BW (*Burgergerlijk Wetboek*) hal tersebut tercantum dalam pasal 1688 “suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, dalam hal-hal yang sebagai berikut:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 81.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah boleh menarik kembali atau mencabut hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah itu adalah anaknya sendiri.<sup>43</sup> Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW.

عن طاوس، أنّ ابن عمر، و ابن عباس – رفعاه الى النبي صلى الله عليه و اله و سلّم – قل، لا يحل للرجل ان يعطى العطيه، فيرجع فيها، الا الوالد فيها يعطى ولده، ومثل الرجل يعطى العطيه ثم يرجع فيها، كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه. (رواه الخسة و صححه الترمذى).

Artinya: “Bahwasannya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menerangkan bahwasanya Nabi bersabda: Seseorang tidak boleh memberikan sesuatu kemudian dia menariknya, melainkan pemberian seorang ayah kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan sesuatu kemudian dia mencabutnya, adalah seperti anjing yang makan, bila kenyang dia muntah, dan menelan kembali muntahannya”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, An Nasa’i, At Turmudzi dan Ibnu Majah).<sup>44</sup>

Hadits lain yang menerangkan tentang kebolehan orang tua menarik kembali pemberian atau hartanya tanpa menunggu izin dari anaknya.

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، إنّ أطيّب ماأكلتم من كسبكم، وإنّ اولادكم من كسبكم. (رواه خمسة).

Artinya: “Dari Aisah: Nabi bersabda, sesungguhnya makanan yang paling baik kamu makan, adalah yang diperoleh dari hasil usahamu, dan anak-anakmu adalah bagian dari usahamu”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, An Nasa’i, At Turmudzi, Ibnu Majah).

عن جابر أنّ رجلا قال: يا رسول الله، إنّ لى مالا وولدا، وإنّ أبى يريد ان يجتاح مالى، فقال، انت ومالك لأبيك. (رواه ابن ماجه).

<sup>42</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, 441.

<sup>43</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al- Muqtasid*, Beirut, Dar Al-jiiil, 1409 H/19989, Juz 2, hlm. 247.

<sup>44</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7, Op. Cit.*, hlm. 306.

Artinya: *“Dari Jabir, seorang laki-laki berkata: Ya Rasulallah, aku mempunyai harta dan anak, dan ayahku bermaksud mengambil habis hartaku. Nabi menjawab, Engkau dan harta engkau, boleh dimiliki oleh ayah engkau”*. (H.R. Ibnu Majah).<sup>45</sup>

Sedangkan Ahmad tidak membolehkan. Menurut ulama Kufah, tidak boleh ditarik kembali jika anaknya masih kecil ataupun sudah dewasa, jika hibah itu sudah berada dibawah kekuasaan penerima hibah. Sedangkan para ulama berselisih pendapat tentang hibah yang diberikan seorang ibu. Kebanyakan fuqaha menyamakan ibu dengan ayah. Sebagian ulama tidak membolehkan ibu mencabut kembali hibahnya. Golongan Malikiyah berpendapat: jika ayah masih hidup, ibu dapat menarik kembali hibahnya. Mereka membolehkan juga jika hibah itu masih dalam keadaan utuh.<sup>46</sup> Bahwasannya jumhur ulama atau kebanyakan para ulama mengharamkan atau tidak memperbolehkan senghibah atau pemberi hibah menarik kembali hibahnya atau pemberiannya.

Terkait dengan masalah hibah, para ulama fiqh juga mengemukakan pembahasan tentang status dan hukum yang terkait dengan masalah pemberian ayah terhadap anak. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa seorang ayah harus berusaha memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil. Mereka juga mengatakan, makruh hukumnya memberikan harta yang kualitas dan kuantitasnya berbeda kepada satu anak dengan anak yang lainnya. Apabila sifatnya pemberian, menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak wanita. Seorang ayah harus bersifat adil.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 310.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 308.

<sup>47</sup> Asy Syarbani al- Khatib, *Mughni al Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, juz 2, hlm. 296.

Berlaku adil terhadap anak-anak, menurut jumhur ulama, termasuk dalam pemberian harta ketika sang ayah masih hidup. Namun, hukum memberikan suatu pemberian dengan adil diantara anak-anak bukan berarti wajib, tetapi hanyalah sunah.<sup>48</sup> Akan tetapi ulama Hanabilah dan Muhammad Ibn al-Hasan Asy Syaibani mengatakan bahwa sang ayah boleh saja membedakan pemberiannya terhadap anak-anaknya sesuai dengan ketentuan waris yang ditetapkan Allah SWT. karena mengikuti pembagian Allah SWT. itu lebih baik. Misalnya, memberi anak laki-laki lebih besar dua kali pemberian kepada anak wanita.<sup>49</sup> Perbedaan tersebut dikarenakan berbeda dalam pemahaman suatu dalil al-Qur'an atau hadits.

---

<sup>48</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh: Maktabah Riyadh al-Hadisah, t.th, juz 5, hlm. 604.

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984, Jilid 5, hlm. 35.



### **BAB III**

## **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG No. 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg TENTANG PENARIKAN HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK**

### **A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

#### **1. Lahirnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.<sup>1</sup>

Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan:

---

<sup>1</sup> Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 89.

1. Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.
2. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>2</sup>

Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehingga Peradilan Agama saat ini sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dengan undang-undang ini perdilan agama tercabut dari Departemen Agama dan masuk ke Mahkamah Agung, ini berarti

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 9.

pengakuan yuridis, politis, dan sosiologis terhadap lembaga peradilan agama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, berisi bahwa lingkungan peradilan dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Lingkungan peradilan umum adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung.
- b. Lingkungan peradilan Agama adalah pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, mahkamah agung.
- c. Lingkungan peradilan militer adalah mahkamah militer, mahkamah militer tinggi, mahkamah agung.
- d. Lingkungan peradilan tata usaha negara adalah peradilan tata usaha negara, peradilan tinggi tata usaha negara dan mahkamah agung.<sup>3</sup>

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam saja, jadi lembaga peradilan khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja, hal ini menunjukkan bahwa bagi umat Islam yang berperkara dapat menyelesaikannya melalui peradilan yang hakim-hakimnya beragama Islam serta diselesaikan menurut agama Islam.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dibentuk secara resmi pada tahun 1980 M. Sesuai dengan surat keputusan Menteri Agama RI No. 6/1980 Tentang Perubahan Nama Mahkamah Agung Tinggi Menjadi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

---

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. VI., hlm. 14.

Dan gedung Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang terletak di jalan Hanoman No: 18 Semarang diresmikan oleh Bapak Menteri Agama RI. H. Munawir Syadzali, MA. Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 1987 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1407 H.<sup>4</sup>

#### Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang

1	NAMA	Pengadilan Tinggi Agama Semarang
2	ALAMAT	Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146 Telp. 024-7600803 Fax. 024-7603866
3	DASAR PEMBENTUKAN	Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 6/1980 Tentang Perubahan Nama Mahkamah Islam Tinggi Menjadi Pengadilan Tinggi Agama Semarang
4	WILAYAH HUKUM	
	Kabupaten	36 Kabupaten
	Kecamatan	563 Kecamatan
	Desa/Kelurahan	8.893 Desa/Kelurahan
	Batas Wilayah	Sebelah Utara Laut Jawa
		Sebelah Timur Propinsi Jawa Timur
		Sebelah Barat Propinsi Jawa Barat
		Sebelah Selatan Samudra Hindia
5	LETAK GEOGRAFIS	7°00' Lintang Selatan 110°24' Bujur Timur
6	JUMLAH PA	36
	Klas I-A	9
	Klas I-B	23
	Klas II	4

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bpk. Moh. Dardiri, SH (Panmud Hukum), tanggal 3 Juni 2008.

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

1. Pengadilan Tinggi Agama Semarang dibentuk berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda No: 18 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama "*Hof Voor Islamietische Zaken*"
2. Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarka Surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 Nopember 1937 No: 18
3. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 tentang pembentukan Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dengan menyebutkan sebagai cabang dari Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta
4. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1980 tentang Perubahan Nama Mahkamah Islam Tinggi di Semarang menjadi Pengadilan Tinggi Agama Semarang
5. Pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.<sup>5</sup>

## **2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

Untuk menghasilkan kerja yang baik, perlu dibutuhkan sistem pemerintahan yang efektif dan berdaya guna sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1996 Pengadilan Tinggi Agama Semarang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:<sup>6</sup>

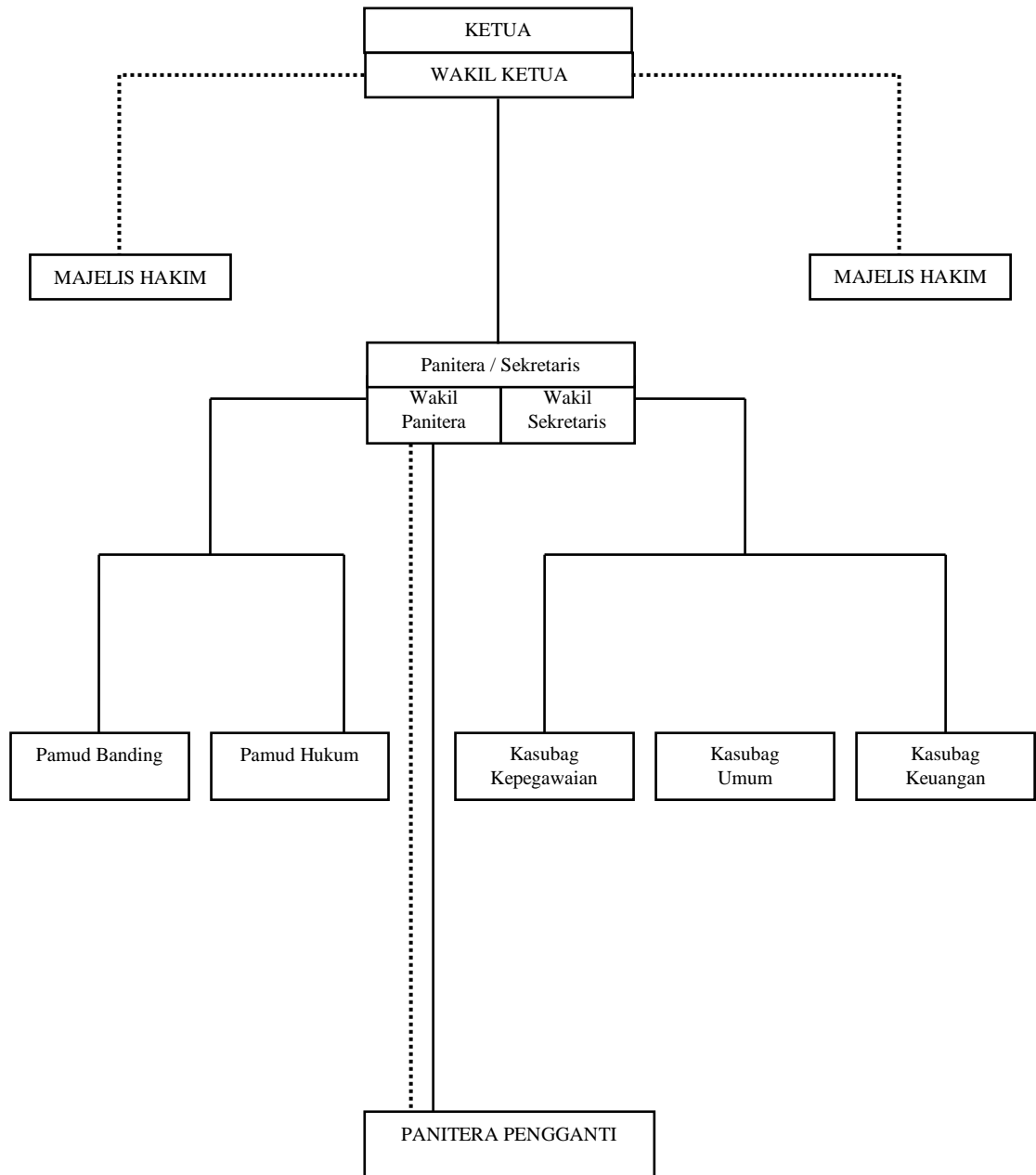
---

<sup>5</sup> [www.ptasemarang.net](http://www.ptasemarang.net)

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bpk. Moh. Dardiri, SH. *Op. Cit.*

## BAGAN SUSUNAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

### SE. MA. RI NOMOR 5 TAHUN 2006



\_\_\_\_\_ : Garis Tanggung Jawab

----- : Garis Koordinasi

### SUSUNAN PEJABAT PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

No	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Khalilurrahman, SH. MH	Ketua
2	Drs. H. Syamsul Falah, SH. M.Hum	Wakil Ketua
3	Drs. Djuhrianto Arifin, SH	Panitera / Sekretaris
4	Dra. Hj. Siti Maryam	Wakil Panitera
5	Drs. Arifin. S, SH	Wakil Sekretaris
6	Fakhrur, SHI	Panmud Banding
7	Moh. Dardiri, SH	Panmud Hukum
8	Abd. Mufid	Kasubag Kepegawaian
9	Drs. Muh. Uzair	Kasubag Umum
10	Jitu Nove Wardoyo, SH	Kasubag Keuangan
11	H. Wahyudi. DS, SH. MH	Panitera Pengganti
12	Mutakim, SH	Panitera Pengganti
13	Mujiani, SH	Panitera Pengganti
14	Khoirun Nisa, S.Ag	Panitera Pengganti
15	Budi D. Walujo, SH	Panitera Pengganti
16	Tulus Suseno, SH	Panitera Pengganti
17	Drs. K. Effendi, SH	Panitera Pengganti

## SUSUNAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA

### SEMARANG

No	NAMA
1	Drs. H. Muhsoni, SH
2	Drs. Ali Muchson, M.Hum
3	Drs. H. Agus Salim, SH. M.Hum
4	H. Masdar, SH
5	Drs. H. Yahya Arul, SH
6	Drs. H. Sutjipto, SH
7	Dra. Hj. Faizah
8	Drs. H. Ibrahim Salim, SH
9	Drs. H. Shofrowi, SH. MH
10	Drs. H. Syihabuddin Mu'ti, SH
11	Drs. Moh. Chamdani Hasan
12	Drs. H. Bunyamin, SH
13	Drs. H. Mafruchin Ismail, SH
14	Dra. Ayunah M. Zabini, SH
15	Drs. H. M. Djamhuri R., SH
16	Drs. H. M. Zubaidi, SH
17	Drs. H. Wiyoto, SH
18	Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum



## **B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

**No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. Tentang Penarikan Hibah Orang Tua**

### **Terhadap Anak**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding yang telah menjatuhkan putusan perkara No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. yang mana kasus ini sebagai obyek penelitian penulis.

### **1. Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Agama Pemalang Perkara No: 625/Pdt.G/2006/PA.Pml. Tentang Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anak**

Sebelum penulis mengetengahkan kasus tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak, maka untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan kedudukan orang-orang yang berperkara, karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang merujuk pada putusan Pengadilan Agama Pemalang No: 625/Pdt.G/2006/PA.Pml. maka disini penulis akan menerangkan sedikit gambaran umum tentang putusan di Pengadilan Agama Pemalang No: 625/Pdt.G/2006/PA.Pml.

Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Pemalang adalah sebagai berikut:

Nuryati binti Sajian Tergugat I sekarang Pembanding, yang statusnya sebagai anak. Melawan Saitah binti Dakman, semula Penggugat sekarang Terbanding yang statusnya sebagai orang tua. Pihak lain yang berperkara dalam masalah ini adalah: Tarjo, semula Tergugat II sekarang Turut Terbanding I, Kepala Desa Gondang, semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding II.

Bahwa Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Sajian dan telah meninggal dunia, sejak tahun 2005 rumah tempat tinggal Penggugat di Desa Gondang Rt.02 Rw.03 sekarang ditempati oleh Tergugat I, sedangkan Penggugat tinggal di rumah cucunya yang bernama Khotimah.

Bahwa perkawinan Penggugat dengan Sajian telah dikaruniai 5 orang anak yaitu: Murtiah binti Sajian, Sudarni binti Sajian, Karnadi bin Sajian, Waun bin Sajian, Nuryati binti Sajian (Tergugat I)

Bahwa Penggugat mempunyai harta kekayaan berupa:

- a. Sebidang sawah C.1160 Persil 44 S.I luas 348 da (3480 M2 / ½ bau) atas nama Nuryati Saitah terletak di blok Waren II Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (obyek sengketa I).
- b. Sebidang tanah darat C.1160 Persil 69 S.I luas ± 38 da (380 M2) yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal atas nama Nuryati Saitah terletak di blok Siketi Desa gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (obyek Sengketa II).

Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah oleh Penggugat sudah diberikan kepada Tergugat I pada tanggal 12 Desember 1983, di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan disaksikan Kepala Desa (almarhum Ismail) dan Sekdes (M. Dimyati) juga bersama-sama ahli waris yang lain yakni: Sudarni, Martiah, Karnadi, Waun. Karena mereka masing-masing juga mendapat bagian dan sudah sepakat antara mereka, selang beberapa waktu Saitah binti Dakman sebagai orang tua

mengajukan gugatan mengenai masalah penarikan harta yang pernah diberikan atau dihibahkan kepada anaknya Nuryati binti Sajain (Tergugat I sekarang pbanding) kepada Pengadilan Agama Pemalang.

Pada putusan Pengadilan Agama Pemalang perkara No: 625/Pdt.G/2006/PA.Pml. majelis hakim memutuskan dalam perkara tersebut dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 “hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, dan memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) sebagian.
2. Menetapkan bahwa:
  - a. Sebidang sawah C.1160 Persil 44 S.I luas 348 da (3480 M2 / ½ bau) atas nama Nuryati Saitah terletak di blok Waren II Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (obyek sengketa I).
  - b. Sebidang tanah darat C.1160 Persil 69 S.I luas ± 38 da (380 M2) yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal atas nama Nuryati Saitah terletak di blok Siketi Desa gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (obyek Sengketa II). Adalah harta milik Penggugat (Saitah binti Dakman) yang telah dihibahkan kepada Tergugat I (Nuryati binti Sajain) pada tanggal 12 Desembaer 1983 sah menurut hukum.

**2. Perkara Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. Tentang Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anak**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada Senin tanggal 11 Juni 2007 telah menyelesaikan dan menjatuhkan putusan perkara No. 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg yang mana putusan perkara tersebut diajukan sebagai dasar obyek penelitian penulis.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :

NURYATI Binti SAJIAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Gondang Rt.02 Rw.01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada TURIYAH, SH. Advokat yang berkantor di jalan A. Yani No: 77 Pemalang, semula Tergugat I sekarang “PEMBANDING”.

**MELAWAN**

1. SAITAH Binti DAKMAN, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Gondang Rt.08 Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, semula Penggugat sekarang “TERBANDING”
2. TARJO, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gondang Rt.01 Rw.07 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, semula Tergugat II sekarang “TURUT TERBANDING I”
3. Kepala Desa Gondang, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, semula Turut Tergugat sekarang “TURUT TERBANDING II”

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor: 625/Pdt.G/2006/PA.Pml pada tanggal 7 Nopember 2006 bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1427 H, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hakim pertama dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Setelah memeriksa berkas perkara dari Pengadilan Agama Pemalang No: 625/Pdt.G/2006/PA.Pml., Pengadilan Tinggi Agama Semarang menerima berkas perkara tersebut yang kemudian memutuskan dengan pertimbangan hukum sendiri.

Menimbang, bahwa Hakim Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat yakni bahwa Penggugat pada tanggal 12 Desember 1983 telah menghibahkan hartanya berupa obyek sengketa I dan II kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perselisihan dan pengusiran Tergugat I kepada Penggugat, hakim pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi perselisihan atau tidak, karena menurut kaidah hukum Islam yang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam bahwa penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya oleh orang tuanya sendiri, ternyata tidaklah diperlukan syarat-syarat tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut tidak perlu dibuktikan sehingga keterangan saksi kedua Penggugat mengenai hal ini tidak perlu dipertimbangkan.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriksa berkas perkara dari Pengadilan Agama Pemalang yang memutuskan dengan pertimbangan bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat yakni bahwa Penggugat pada tanggal 12 Desember 1983 telah menghibahkan hartanya berupa obyek sengketa I dan II kepada Tergugat I, dan mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 tentang penarikan hibah ternyata tidaklah diperlukan syarat-syarat tertentu.

Bahwa Tergugat I sebagai anak tidak melaksanakan kewajiban memelihara dan menghormati Penggugat sebagai orang tua, maka Penggugat mencabut atau menarik kembali seluruh harta peninggalan berupa obyek sengketa I dan II, Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor

1 tahun 1974 tentang perkawinan “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya perselisihan dan pengusiran jelas terkait erat dengan pencabutan pemberian Penggugat kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Hakim Pertama juga telah mempertanyakan masalah perselisihan dan pengusiran kepada para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat I.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat : Sakmad bin Khamim, Siti Khotimah binti Subardi dan saksi Tergugat I: Wachidin bin Castro, Karnadi bin Sajian dan Dimyati bin Mujib, semuanya menyatakan tidak mengetahui alasan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I serta pengusiran Tergugat I terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I serta pengusiran Tergugat I kepada Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat I harus dinyatakan tetap memenuhi ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagai anak yang soleh dan tetap berbakti kepada Penggugat sebagai orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dipertanyakan dengan alasan apa Penggugat menarik kembali pemberian (hibah) nya.

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Pertama bahwa “dalil tersebut tidak perlu dibuktikan sehingga keterangan saksi kedua Penggugat mengenai hal ini tidak perlu dipertimbangkan”, adalah bertentangan dengan kenyataan langkah pembuktian yang telah ditempuh sendiri oleh Hakim Pertama.

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Hakim Pertama adalah pendapat yang lemah karena untuk apa dipertanyakan kalau hanya untuk dikesampingkan.

Bahwa masalah penarikan hibah diindikasikan adanya masalah tidak berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Tetapi pada kenyataannya dalam tahap pembuktian apakah benar terjadi perselisihan antara orang tua dan anak, hakim pertama mengesampingkan keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Pertama bahwa: “menurut kaidah hukum Islam yang tidak bertentangan ketentuan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam bahwa penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya oleh orang tuanya sendiri, ternyata tidaklah diperlukan syarat-syarat tertentu, merupakan kesimpulan yang tidak mutlak karena masih harus dilihat sesuai dengan kasusnya.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap karena keempat saudaranya yang lain tidak ikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat. Penggugat hanya menuntut kepada Tergugat I, terdapat sisa



atau kelebihan dalam pembagian hibah waris, baik luas tanah sawah maupun tanah pekarangan.

Menimbang, berdasarkan replik Penggugat tersebut maka ditemukan fakta hukum:

Bahwa semua anak-anak Penggugat telah menerima pembagian hibah waris dari Penggugat.

Bahwa semula yang diminta adalah “Penggugat mencabut atau menarik kembali semua harta peninggalan berupa obyek sengketa I dan II dan kemudian dirubah sebelum jawaban Tergugat I menjadi :

“Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan atau mengembalikan pengelolaan obyek sengketa I dan obyek sengketa II dan sesudah jawaban Tergugat I dirubah menjadi:

“Penggugat hanya menuntut kepada Tergugat I, karena terdapat sisa atau kelebihan dalam pembagian hibah waris baik luas tanah sawah maupu luas tanah pekarangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi perubahan petitum yang semula “semua” obyek sengketa I dan obyek sengketa II, “menjadi kelebihannya saja”.

Menimbang, bahwa karena perubahan petitum disampaikan pada tahap replik berarti sesudah adanya jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut haruslah tidak diterima.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa harta yang di hibahkan Penggugat kepada Tergugat I bahwa obyek sengketa I seluas  $\frac{1}{4}$

bau, oleh Tergugat I telah terjual Kepada Tergugat II, mekipun Tergugat II tidak pernah menyampaikan jawaban, namun mengenai hal ini telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan juga telah didukung oleh keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat I, bahkan Turut Tergugat telah menyatakan bahwa tanah yang dibeli Tergugat II telah bersertifikat atas nama Tarjo, oleh karenanya tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan II menyerahkan obyek sengketa I dan II dalam keadaan kosong haruslah di tolak.

Menimbang, bahwa Hakim Pertama tidak cermat dalam menyimpulkan pengakuan Tergugat I tentang “penjualan sebagian obyek sengketa I” sehingga disimpulkan “telah mengaku menjual”, padahal pengakuan Tergugat I tersebut di sertai dengan klausul : “bahwa uangnya (hasil penjualan) diminta Penggugat untuk cucunya bernama Untung adik dari Khotimah, untuk masuk ABRI”.

Hakim pertama berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 mengenai penarikan kembali hibah tidaklah diperlukan syarat-syarat tertentu, kemudian hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat, bahwa masalah penarikan hibah harus melihat terlebih dahulu kasusnya.

### **3. Dasar Hukum Majelis Hakim**

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak adalah :

- a. Bahwa hakim berpendapat bahwa asas dalam hibah adalah keadilan, berdasarkan sabda Nabi SAW. :

افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعد لوا في اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقة.

Artinya : “Apakah kamu lakukan hal ini terhadap semua anakmu ? Ayah menjawab : “Tidak”. Rasulullah SAW. Bersabda : “Takutlah kamu kepada Allah dan berlakulah adil kamu terhadap anak-anakmu”. Lalu ayah pulang dan menarik kembali pemberiannya. (HR. Muslim dari An Nu'ma bin Basyir / Analisa Hukum Islam Bidang Hibah hal. 88).

Bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tersebut maka jika satu hibah ditarik kembali maka semua hibah yang lain haruslah ditarik kembali juga.

Bahwa Penggugat hanya menarik kembali hibah yang diberikan kepada Tergugat I, tetapi tidak menarik kembali hibah yang diberikan kepada anak Penggugat yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan di atas maka sampai tahap ini, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

- b. Menimbang, bahwa pendapat Hakim Pertama (Pengadilan Agama Pemalang) yang berpendapat bahwa menurut kaidah hukum islam yang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam bahwa penarikan kembali hibah yang telah diberikan anaknya oleh orang tuanya sendiri, ternyata tidaklah diperlukan syarat-syarat tertentu, merupakan kesimpulan yang tidak mutlak karena masih harus dilihat sesuai dengan kasusnya.

- c. Bahwa Hakim Tinggi sependapat dengan kaidah yang tersebut dalam Kitab Jamal Wahab juz 2 halaman 349 :

و الحكم قبل البيان ظلم و ترك الحكم بعد البيان ظلم .

Artinya : *“penetapan hukum sebelum jelas adalah dzalim dan meninggalkan penetapan hukum sesudah jelas adalah dzalim”*.

Menimbang, bahwa sikap Hakim Pertama “bahwa penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya oleh orang tuanya sendiri, tidaklah diperlukan syarat-syarat tertentu, tidak berarti “tanpa berdasarkan fakta dan mengabaikan hukum acara”.

#### **4. Keputusan Majelis Hakim Atas Perkara No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg**

Dalam menyelesaikan perkara No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg Majelis Hakim Mengeluarkan putusan yang isinya sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan banding Pembanding.
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor : 625/Pdt.G/2006/PA.Pml tanggal 7 Nopember 2006.

Untuk lebih lengkapnya lihat lampiran berkas perkara putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. TENTANG PENARIKAN HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK**

#### **A. Analisis Hukum Materiil Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg Tentang Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anak.**

Pada bab sebelumnya penulis telah kemukakan tentang putusan penarikan hibah orang tua terhadap anak. Pada putusan Pengadilan Agama Pemalang No: 625/Pdt.G/2006/PA.Pml. yang pada intinya berisi tentang dikabulkannya gugatan Penggugat tentang penarikan kembali harta yang telah diberikan kepada Tergugat I dan pada putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. telah memeriksa dan memutuskan yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Agama Pemalang, yang mana ketika dilihat dari dasar hukum yang dipakai adalah sama dengan yang dipakai Pengadilan Agama Pemalang yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 "Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya".

Hukum materiil adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>1</sup> Melihat dari pengertian tersebut, semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dimaksudkan sebagai argumen sebagai pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat umumnya

---

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1992, Cet. 24, hlm. 9.

dan pada pihak yang berperkara pada khususnya, oleh karena itu haruslah mempunyai nilai obyektif. Adanya alasan-alasan itulah maka putusan hakim mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang memutuskannya.

Pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. tentang penarikan kembali hibah orang tua terhadap anak, dan dikabulkannya banding Pembanding (dulu Tergugat I) dengan pertimbangan hukum yang merujuk pada putusan Pengadilan Agama Pemalang sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Terbanding (dulu Penggugat) telah menghibahkan hartanya kepada Pembanding yaitu obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah oleh Penggugat sudah diberikan kepada Tergugat I pada tanggal 12 Desember 1983, di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan disaksikan Kepala Desa (almarhum Ismail) dan Sekdes (M. Dimiyati) juga bersama-sama ahli waris yang lain yakni: Sudarni, Martiah, Karnadi, Waun, dan sekarang obyek sengketa telah dijual atas nama Tarjo.
2. Menimbang, adanya perselisihan orang tua dengan anak disinyalir penyebab terjadinya penarikan kembali hibah, terkait dengan pasal 46 ayat (1) Undang-undang No: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.
3. Menimbang, bahwa hibah bisa ditarik kembali berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212.

Dari pertimbangan hukum itulah yang menjadi pokok yang digunakan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menghasilkan putusan. Pertimbangan hukum merupakan komponen penting sebagai acuan untuk memberikan kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolaknya suatu putusan.

Dalam pertimbangan hukum yang pertama yaitu telah jelas bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II telah serahkan dari Terbanding (Penggugat) kepada Pembanding (Tergugat I) dan telah berpindah tangan atas nama Tarjo,<sup>2</sup> penulis sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang tidak menguatkan atau membatalkan putusan Pengadilan Agama Pemalang walaupun banyak pendapat tentang penarikan kembali pemberian atau hibah boleh ditarik kembali, tetapi perlu dilihat juga bahwa harta yang telah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali dikarenakan telah dijual kepada orang lain, maka pihak orang tua tidak dapat mencabut kembali karena telah berpindah milik,<sup>3</sup> dan harus juga melihat dari aspek kemaslahatan.

#### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan.”<sup>4</sup>

Jika harta yang telah di hibahkan dapat ditarik kembali, maka akan berurusan dengan pihak lain yaitu orang telah membeli harta tersebut, apalagi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama arang lain, karena sertifikat

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg., hlm. 8.

<sup>3</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Muin*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, Jilid II, hlm. 999.

<sup>4</sup> Moh. Adib Bisri, *Terjemah Faraidul Bahiyah (Risalah Qawaid Fiqh)*, Kudus: Menara, t.th, hlm. 24.

tersebut termasuk alat bukti yang dapat dijadikan keterangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penarikan kembali hibah yang disinyalir adanya perselisihan antara orang tua dengan anak yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 46 ayat (1) tentang perkawinan “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”. Masalah tersebut berkaitan dengan keterangan para saksi, saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau kejadian tersebut. Seorang saksi tidaklah sekedar orang yang kenal dengan para pihak yang berperkara, tetapi memang harus benar-benar mengetahui seluk beluk masalah yang terjadi antara para pihak.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam pengambilan keputusan sama dengan yang dipakai oleh Pengadilan Agama Pemalang yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 yang menerangkan tentang bolehnya orang tua menarik kembali pemberian atau hibahnya. Berkaitan dengan penyelesaian perkara di pengadilan, hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan dengan hukum materiil dan hukum formal yang berlaku, tergantung bagaimana kasusnya yang terjadi dilapangan.<sup>5</sup> dasar hukum tersebut telah tepat, sedangkan masalah kasus yang terjadi dilapangan yang telah memeriksa bekas

---

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Ali Muchson, M.Hum. (Hakim Ketua Majelis) Tanggal 9 Juni 2008.



perkara dari Pengadilan Agama Pemalang mengenai pemeriksaan alat-alat bukti dibahas dalam hukum formal atau hukum acara.

**B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg Tentang Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anak.**

Dalam analisis dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan hukumnya. Dengan pertimbangan hukum tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan putusan antara Pengadilan Agama Pemalang dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Diantara pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa apakah antara Pembanding (Tergugat I) dan Terbanding (Penggugat) telah terjadi perselisihan atau tidak, hal ini terkait dengan pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik". Masalah tersebut berkaitan dengan keterangan para saksi, saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau kejadian tersebut. Seorang saksi tidaklah sekedar orang yang kenal dengan para pihak yang berperkara, tetapi memang harus benar-benar mengetahui seluk beluk masalah yang terjadi antara para pihak.

2. Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Hakim Pertama telah mempertanyakan masalah perselisihan dan pengusiran kepada para saksi, baik saksi Penggugat (Terbanding) atau Tergugat I (Pembanding). Berkaitan dengan penyelesaian perkara di pengadilan, hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan dengan hukum materiil dan hukum formal yang berlaku. Dalam pertimbangan hukum tersebut mengenai kesaksian terkait perselisihan para pihak, meskipun pada dasarnya pemeriksaan pada tingkat banding hakim tidak berhadapan dengan para pihak yang berperkara dan para saksi, akan tetapi dengan berdasar pada berkas perkara dengan meneliti proses pemeriksaan dengan diterapkannya hukum formal dan hukum materiil yang dilakukan Pengadilan Agama, cukup realistik dan rasional sehingga tidak terjadi proses yang melelahkan para pihak. Mengenai keterangan para saksi yang merujuk pada berkas perkara putusan Pengadilan Agama Pemalang, pengambil putusan tersebut harus benar-benar memperhatikan semua keterangan saksi secara seksama, memang benar Penggugat (Terbanding) telah menghibahkan hartanya kepada Tergugat I (Pembanding), perlu dilihat kembali bahwa harta tersebut adalah harta gono-gini berdasarkan keterangan para saksi.<sup>6</sup> Jika harta yang dihibahkan adalah harta gono-gini atau harta bersama maka yang menarik kembali haruslah kedua belah pihak yang mempunyai harta tersebut, tetapi penarikan hibah tersebut disinyalir adanya perselisihan antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat I (Pembanding) akan

---

<sup>6</sup> Putusan, *Op. Cit.*, hlm. 9.

tetapi apakah benar terjadi perselisihan diantara keduanya. Masalah tersebut berkaitan dengan keterangan para saksi, saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau kejadian tersebut. Seorang saksi tidaklah sekedar orang yang kenal dengan para pihak yang berperkara, tetapi memang harus benar-benar mengetahui seluk beluk masalah yang terjadi antara para pihak, dalam memeriksa keterangan para saksi telah tepat, karena dalam masalah perselisihan, kesaksian keluarga dapat dipertimbangkan (pasal 145 ayat (2) HIR).<sup>7</sup> Sehingga masalah yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 46 ayat (1) tentang perkawinan “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”, bahwa Pembanding (Tergugat I) termasuk anak yang menghormati orang tua, karena harta yang ditarik tersebut tidaklah dipakai sepenuhnya oleh Pembanding (Tegugat I) akan tetapi harta tersebut dipakai untuk kepentingan cucu Terbanding (Penggugat) untuk biaya masuk ABRI atas nama Untung.<sup>8</sup> karena jika melihat keterangan para saksi, saksi tidak mengetahui secara pasti apakah terjadi perselisihan atau tidak.<sup>9</sup> Berbeda dengan putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Pematang yang kurang seksama memeriksa

---

<sup>7</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, Cet. V, hlm. 31.

<sup>8</sup> Putusan, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>9</sup> Putusan, *Op. Cit.*, hlm. 5.

keterangan para saksi, dan mengabakannya. Untuk apa saksi diperiksa tetapi pada kenyataannya keterangannya dikesampingkan.

3. Menimbang, bahwa Tergugat I (Pembanding) dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa subyek gugatan Penggugat (Terbanding) tidak lengkap, karena saudara yang lain tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat (Terbanding). Suatu putusan pengadilan haruslah berdasar pada keadilan semua para pihak yang berperkara, jika seorang hakim jeli memeriksa kasus tersebut hakim haruslah mengikut sertakan semua anak yang telah mendapatkan harta hibah sebagai pihak yang berperkara sebagai wujud dari keadilan, jika anak yang satu diberi harta pemberian maka jika anak yang satu ditarik hartanya anak yang lain haruslah ditarik semua yaitu 4 (empat) anak yang lain, karena jika tidak ditarik semua dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti iri, dendam, dan permusuhan.
4. Menimbang, bahwa terjadi perubahan petitum dalam penarikan hibah yang semula "semua" obyek sengketa I dan obyek sengketa II "menjadi kelebihannya saja". Terkait dengan adanya perubahan permintan (petitum), Adanya perubahan atau penambahan isi gugatan pada putusan tersebut sebenarnya diperkenankan, asal perubahan tersebut tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak. Perubahan gugatan dilarang bila mengemukakan hal atau keadaan baru sehingga yang diminta kepada

hakim sama sekali lain daripada yang semula.<sup>10</sup> Kalau perubahan gugatan terjadi setelah tergugat menjawab maka harus dengan persetujuan tergugat, ditambah dengan persetujuan majelis hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan. Dengan adanya perubahan gugatan yang asalnya “semua” dan berubah “menjadi kelebihannya saja” maka majelis hakim tidak menerima perubahan tersebut. Hakim tidak boleh mengabulkan daripada yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Penulis sependapat dengan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pemeriksaan pada tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian. Jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan, dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri. Sebaliknya jika pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara yang diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadilinya, maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi daripada putusan

---

<sup>10</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV Rajawali, Cet II, 1991, hlm. 116.

pengadilan tingkat pertama, seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yaitu membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Pemalang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg. sudah sesuai dengan hukum materiil dan hukum formal (hukum acara). Hukum materiil berkaitan dengan peraturan atau undang-undang yang dipakai dalam pemeriksaan suatu perkara, yaitu menggunakan undang-undang yang sesuai dengan kasus yang terjadi. Hukum acara dari awal pemeriksaan berkas perkara dari Pengadilan Agama Pemalang No: 625/Pdt.G/2006/PA.Pml. sampai pada putusan akhir. Dalam hal pertimbangan hukum, dasar hukum, dan pembuktian sama-sama memeriksa bukti-bukti, para saksi, dan sama dalam menggunakan dasar hukum yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212.
2. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hakim dalam memeriksa sampai tahap pengambilan keputusan haruslah tepat dalam menggunakan undang-undang dan melihat dari kasusnya terlebih dahulu, seperti dalam kasus penarikan hibah antara orang tua dengan anaknya sendiri yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg.

yang menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Bahwa dasar hukum yang dipakai sama dalam memutuskan suatu perkara akan tetapi berbeda dalam hal penafsiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 dan dasar pertimbangan hukum, yang mengakibatkan perbedaan dalam putusan antara Pengadilan Agama Pemalang dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Hakim majelis Pengadilan Agama Pemalang berpendapat bahwa pasal tersebut tidaklah diperlukan syarat-syarat tertentu dalam penarikan kembali hibah, akan tetapi hakim majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa pasal tersebut bukanlah harga mati, akan tetapi haruslah melihat kasusnya terlebih dahulu (jelas bahwa Terbanding telah menghibahkan hartanya, dari keterangan saksi harta tersebut adalah harta gono-gini, dan telah berpindah tangan) jadi pemberian (hibah) tidak bisa ditarik kembali. Dalam masalah pemberian (hibah) seharusnya para orang tua haruslah bersifat adil antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Begitu pula dengan masalah penarikan kembali pemberian (hibah) orang tua juga harus bersifat adil.

3. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pemeriksaan pada tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian. Jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang



ditentukan oleh undang-undang dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan, dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri. Sebaliknya jika pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara yang diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadilinya, maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi daripada putusan pengadilan tingkat pertama, seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yaitu membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Pemalang.

## **B. Saran**

1. Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan seorang hakim harus jeli dalam menggunakan landasan atau undang-undang yang akan dipakai dalam memutuskan suatu perkara dan jeli dalam melihat dasar pertimbangan-pertimbangan hukum serta melihat kasusnya, dari keterangan para pihak yang berperkara, saksi-saksi, bukti-bukti, dan sebagainya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya dan memutuskan perkara yang mencerminkan keadilan. Seperti yang tersebut dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman.
2. Dalam masalah pemberian (hibah) seharusnya para orang tua haruslah bersifat adil antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Begitu pula dengan masalah penarikan kembali pemberian (hibah) orang tua harus

bersifat adil. Jika anak yang satu diberi, maka yang lain pun harus mendapatkan pemberian, begitu pula dengan penarikan kembali pemberian (hibah), jika anak yang satu ditarik kembali pemberiannya maka yang lain harus ditarik pemberiannya (hibahnya), jika tidak demikian, diawatirkan akan menimbulkan rasa iri atau akan timbul masalah lain yang tidak diinginkan dikemudian hari.

### **C. Penutup**

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan yang berarti.

Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. sehingga saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fyzee, Asaf A.A, *Pokok-Pokok Hukum Islam II (Terjemah)*, Jakarta: Tintamas, 1966.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. II, 1995.
- Al- Khatib, Asy Syarbani, *Mughni al Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, 1978.
- Al-Anshori, Abi Yahya Zakariyah, *Fath Al-Wahab*, Semarang: Toha Putra, Juz 1, t.th.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Muin*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, Jilid II, 1994.
- Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al- Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 3, t.th.
- Al-Malîbary, Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Semarang: Pustaka Alawiyah , t.th.
- Al-Qazwini, Al-Imaam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majjah, *Sunan ibn Majjah*, Kairo: Tijariyah Kubra, t.th.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arto, Mukti, *Praktek-Praktek Perkara perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VI, 2005.
- Ash Shidieqy, Muhammad Hasbie, *Pengantar Fiqh muamalah*, Cet. 4, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- \_\_\_\_\_, Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. III, 2001.

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet III, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 5, 1984.
- Bahan Penyuluhan Hukum (UU No. 7 Tahun 1989 tentang Perdilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Faraidul Bahiyah (Risalah Qawaid Fiqh)*, Kudus: Menara, t.th.
- Chuzaimah dan Hafiz Anshary AZ. (Editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Cet.3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1996.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1974.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam Seri Perundangan, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cet. I, 2004.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet. IV, 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. XVIII, 2004.
- Muhammad, Abu bakar, *Subulussalam (Terjemah)*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Munawir, A. W., *Kamus Al-Munawir*, Surabaya, Pustaka Progresif, Cet. 14, 1997.
- Munir, Muhammad, *Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pencabutan Kembali Hibah*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2006.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 1996.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.Smg.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Riyadh: Maktabah Riyadh al-Hadisah, juz 5, t.th.

Rahman, Asymuni A., dkk (Tim Penyusun), *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Depag RI, Cet. II, 1986.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV Rajawali, Cet II, 1991.

Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al- Muqtasid*, Beirut, Dar Al-jiiil, Juz 2, 1409 H/1989.

\_\_\_\_\_, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid (Terjemah)*, Bandung: Trigenda Karya, 1996.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 14 (Terjemah)*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997.

\_\_\_\_\_, *Fikih Sunnah Jilid 4 (Terjemah)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. I, 2006.

\_\_\_\_\_, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, Juz 3, t.th.

Saleh, Wantjik, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. V, 1983.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cet. II, 1995.

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, Cet. 24, 1992.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. 2, 1999.

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet III, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III. Cet. III, 2005.

Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Ali Muchson, M.Hum (Hakim Tinggi PTA Smg)

Wawancara dengan Bpk. Moh. Dardiri, SH (Panmud Hukum PTA Smg).

[Www.ptasemarang.net](http://www.ptasemarang.net)